

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan usaha kecil dan menengah (UKM). Karena Usaha Kecil dan Menengah (UKM) telah tumbuh dan berkembang sejak sebelum berdirinya negara ini. Begitu banyak kontribusi UKM terhadap perekonomian Indonesia, antara lain : pada tahun 2008 saja UKM telah menyumbang 55,56 persen terhadap PDB nasional, menyerap tenaga kerja 90.896.270 orang (97.04 persen dari total penyerapan tenaga kerja) serta UKM mampu menciptakan devisa nasional melalui ekspor non migas dan investasi nasional (informasi dari kementerian bagian data-Biro Perencanaan Kementerian Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia).

UKM telah berkembang dan memperoleh sumber pendanaan dari dirinya sendiri maupun melalui dana keuangan mikro seperti pegadaian, koperasi atau lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dalam peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1998 pasal 19 disebutkan bahwa Menteri mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan usaha kecil, baik yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Pemerintah dan perbankan berupaya membantu UKM terus menerus. Kementerian KUKM menyediakan bantuan permodalan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bentuk keseriusan pemerintah ini patut

dipuji. Hanya saja pengembangan sistem manajerial UKM masih belum banyak diperhatikan oleh pemangku kepentingan. Kenyataannya, kendala utama yang dihadapi pihak UKM selain modal adalah penerapan manajemen yang professional. Selama ini, UKM banyak beranggapan bahwa pembukuan (laporan keuangan) dalam usahanya adalah suatu hal yang sulit. Dan pada umumnya pemilik kurang membutuhkan informasi akuntansi karena keterlibatannya secara pribadi dan langsung dalam kegiatan usaha. Ketidakmampuan menyediakan dan menggunakan informasi akuntansi merupakan salah satu kelemahan dari sisi manajemen. Padahal, laporan keuangan yang akurat dan baku akan banyak membantu pelaku usaha kecil dan menengah dalam upaya pengembangan bisnisnya secara kuantitatif dan kualitatif.

Pengelolaan dana merupakan faktor kunci dalam keberhasilan UKM. Kekurang-cermatan pengelolaan dana menyebabkan wirausahawan mencampurkan dana usaha dan dana pribadi. Pengelolaan dana yang buruk dapat mengakibatkan UKM tidak dapat mencegah, mendeteksi maupun mengoreksi tindak kecurangan yang terjadi. Bagi bank, permasalahan UKM terletak pada kelayakan usaha, baik aspek keuangan maupun aspek pemasaran dan tenaga kerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa minimnya akses keuangan UKM terutama disebabkan oleh belum terdapat kesamaan pandangan dan persepsi antara persyaratan bank yang harus dipenuhi dan yang dimiliki oleh UKM.

Kemampuan untuk menyiapkan informasi akuntansi ini sangat tergantung pada kemampuan pemilik menjalankan teknis akuntansi. Informasi akuntansi yang relevan dan tepat waktu dapat digunakan untuk perencanaan, pengendalian,

pembuatan keputusan dan evaluasi kinerja. Pelaku usaha kecil dan menengah kurang memahami standar akuntansi keuangan (Benjamin,1990 dalam Abrory,2010). Sistem pembukuan UKM selama ini umumnya sangat sederhana dan cenderung mengabaikan kaidah administrasi keuangan yang standar (baku).

Dalam artikel Suhairi dan Wahdini (2006 : 2) disebutkan bahwa standar akuntansi keuangan dirasakan sangat memberatkan bagi usaha kecil dan menengah dibandingkan dengan usaha besar. Salah satu faktor sebagai penyebab terjadinya overload adalah rendahnya tingkat penyusunan laporan keuangan pada UKM, dan adanya persamaan standar akuntansi UKM yang sama dengan usaha besar. Dengan kata lain, standar akuntansi keuangan internasional seperti IFRS adalah acuan UKM dalam membuat laporan keuangan yang baku. Dengan adanya standar akuntansi keuangan yang ada, dianggap memberatkan UKM sehingga UKM lebih cenderung untuk tidak menyusun laporan keuangan karena biaya yang harus dikeluarkan lebih besar (penyusunan laporan keuangan) dibandingkan kelebihan pajak terhitung yang harus dibayar. Maka hal itu merupakan salah satu dari permasalahan UKM yang ada pada saat ini, terutama di bidang keuangan. Permasalahan ini merupakan kendala dalam perkembangan UKM di Indonesia.

Oleh karena itu, Ikatan Akuntan Indonesia sudah menyiapkan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang dinamakan dengan SAK- ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik). Munculnya SAK ETAP ini diharapkan entitas-entitas bisnis yang tidak terdaftar dalam pasar modal dapat mengaplikasikannya sebagai standar akuntansi bagi entitas mereka. Prinsip-prinsip SAK penting diperhatikan pihak UKM agar pengelolaan bisnis lebih efektif, efisien dan akurat, agar UKM dapat

mengelola usahanya secara professional dan berkembang lebih besar lagi. SAK-ETAP ini adalah suatu prinsip, prosedur, metode atau aturan penyusunan laporan keuangan pada Entitas Tanpa Akuntansi Publik (ETAP) yaitu entitas usaha yang tidak (belum) tercatat di pasar modal atau tidak dalam proses pengajuan di pasar modal dan entitas ini bukan lembaga keuangan. Entitas usaha yang dimaksud disini adalah untuk unit usaha ekonomi berskala kecil dan menengah (UKM.).

SAK ETAP ini diharapkan dapat berfungsi sebagai acuan praktek akuntansi bagi entitas usaha di Indonesia, utamanya pelaku UKM mengingat isinya telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi usaha yang ada. Ketentuan yang tercantum di dalamnya, secara umum merupakan pengaturan atas praktek pembukuan transaksi yang lazim terjadi pada entitas UKM, sehingga pelaku usaha UKM akan lebih mudah memahami dan menerapkannya. Dengan demikian, aplikasi laporan keuangan sesuai SAK ini merupakan suatu langkah menuju peningkatan akses keuangan bagi entitas usaha kecil dan menengah kepada sumber – sumber keuangan domestik maupun internasional.

Musnandar(2011) berpendapat apabila SAK ETAP diterapkan oleh UKM, pihak perbankan tentu akan merespon dengan positif, sehingga memudahkan perbankan dalam menilai kelayakan bisnis UKM untuk memperoleh bantuan kredit pengembangan usaha. Disamping itu, UKM tentu akan memiliki data (keuangan) akurat yang amat berguna bagi pelaku UKM dalam upaya lebih meningkatkan produktivitas, efektifitas dan efisiensi usaha.

Menurut Peraturan daerah kota Surabaya nomor 1 tahun 2010 pasal 58 disebutkan bahwa Kepala Daerah berwenang melakukan pembinaan terhadap

kegiatan usaha di bidang perdagangan dan perindustrian. Pembinaan sebagaimana dimaksud dapat berupa memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan; pemasaran; sumber daya manusia; dan teknologi. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Surabaya adalah salah satu instansi pemerintah daerah yang membina usaha kecil dan menengah di Surabaya.

Berdasarkan survei sementara diperoleh data bahwa beberapa UKM binaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Surabaya mempunyai pemahaman akuntansi yang beragam. Beberapa pelaku usaha mengaku cukup paham mengenai akuntansi meski belum menerapkannya dalam pengelolaan kegiatan usahanya. Ada beberapa pelaku usaha yang kesulitan dan lupa menjelaskan mengenai pengetahuan akuntansi yang mereka miliki dengan bahasa mereka sendiri. Namun ada pelaku UKM yang memahami laporan keuangan dengan baik meskipun belum sesuai Standar Akuntansi Keuangan.

Berdasarkan uraian diatas judul penelitian ini adalah “Pemahaman Para Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Terhadap Akuntansi Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Studi Kasus UKM Binaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Surabaya)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka permasalahan pokok penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman para pelaku usaha kecil dan menengah terhadap akuntansi yang berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang pemahaman para pelaku usaha kecil dan menengah terhadap akuntansi berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini dapat memberikan masukan dalam meningkatkan pemahaman mengenai standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan referensi bagi penelitian berikutnya yang mengambil judul yang sama sebagai bahan penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dalam mempelajari penelitian ini, maka sistematika skripsi ini disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah dari permasalahan yang akan dibahas, perumusan masalah.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan diuraikan tentang jurnal pendukung, tinjauan teori-teori mengenai definisi yang sangat erat kaitannya dengan penulisan proposal skripsi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini mencakup rancangan penelitian, batasan penelitian, unit analisis, partisipan, data, sumber data dan metode pengumpulan data serta teknik analisis.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN & ANALISIS DATA

Dalam bab IV ini menguraikan hal-hal yang terkait tentang subyek penelitian, sejarah obyek penelitian, analisis data dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab V ini menguraikan hal-hal yang terkait tentang kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan yang terjadi dari penelitian serta saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya.